

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum SKPD.....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	1
C. Sumber Daya Organisasi.....	2
D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	
A.Strategi dan Kebijakan.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja.....	12
B. Analisis Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK.....	13
C. Pengungkapan Renstra yang belum dapat diukur ditahun 2016.....	15
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	26
B. Hasil Analisis Berupa Hambatan Dari Bab III Sasaran.....	27
C. Langkah-langkah yang akan dilakukan tahun berikutnya.....	28
D. Pengungkapan Renstra baru dengan menyusun perjanjian kinerja Baru yang sesuai dengan renstra.....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2018.....	2
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2018.....	3
Tabel 1.3 Data Pendidikan dan Golongan Pegawai per November 2018.....	4
Tabel 1.4 Data Pegawai Negeri Menurut Bidang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per November 2018.....	4
Tabel 1.5 Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Per November 2018.....	4
Tabel 1.6 Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per November.....	5
Tabel 2.1 Strategi Kebijakan.....	9
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja dan Target.....	11
Tabel 3.1 Capaian Kinerja berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.....	12
Tabel 3.2 Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian Yang ada di PK.....	14
Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi.....	15
Tabel 3.5 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2017-2018.....	16
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Renstra.....	18
Tabel 3.7 Analisa Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun kegagalan.....	23
Tabel 4.1 Analisis Hambatan.....	27
Tabel 4.2 Hambatan dan Upaya yang dilakukan ditahun berikutnya.....	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
-------------------------------------	---

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018, yang nantinya akan dijadikan bahan pendukung dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Bermanfaat dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan.

Tanjung Selor, 17 Januari 2019  
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara



Drs. HARTONO, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196105071985031014

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum SKPD**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Utara.

### **B. Tugas Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 79 dan 80 Paragraf 2 dan 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **a. Tugas**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;

- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Perindustrian;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan Industri;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem Informasi Industri;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana Distribusi Perdagangan;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekspor;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis
- l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **C. Sumberdaya Organisasi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan akhir Desember tahun 2015 memiliki jumlah pegawai Negeri Sipil Sebanyak 37 orang dan Pegawai Tidak Tetap Sebanyak 19 Orang berikut ini disajikan Jumlah pegawai Negeri dan Tenaga kontrak Dinas perindustrian, perdagangan koperasi dan UKM

***Table 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2018***

NO.	BAGIAN / BIDANG	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	9	10	19
2.	Bidang Industri	6	4	10
3.	Bidang Perdagangan dalam Negeri	6	8	14
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	8	1	9
5.	Bidang Koperasi & UKM	5	3	8
J U M L A H		33	26	59

Berikut disajikan Jumlah pegawai Tidak Tetap sesuai dengan jenis kelamin dan masing – masing bidang

**Table 1.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2018**

NO.	BAGIAN / BIDANG	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	11	7	18
2.	Bidang Industri	1	1	2
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1	-	1
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	-	-	-
5.	Bidang Koperasi & UKM	1	-	1
J U M L A H		9	8	22

Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung oleh 3 Orang dengan Pendidikan S2, 47 Orang S1, 5 Orang D3, 4 Orang SLTA dan dan didukung oleh 10 Orang S1, 1 Orang D3, 11 Orang SMA Tenaga Kontrak.

Berikut disajikan Tabel pendidikan dan Golongan Pegawai per November 2018 sesuai dengan jenis kelamin

**Tabel 1.3 Data Pendidikan dan Golongan Pegawai per November 2018**

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
7	46	6	-	33	26	3	47	5	4	-	0	59

Berikut ini disajikan Tabel pegawai negeri menurut pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM

**Table 1.4. Data Pegawai Negeri Menurut Bidang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per November 2018**

NO.	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat					2	1	1	4	5	4	1	1	9	10
2.	Bidang Industri					-	-	-	-	6	4	1	0	6	4
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri					1	-	-	-	5	6	-	1	6	7
4	Bidang Perdagangan Luar Negeri					-	-	-	-	8	1	1	0	8	1
5.	Bidang Koperasi & UKM					-	-	-	-	5	3	-	0	5	3
J U M L A H														33	26

Berikut ini disajikan Tabel Tenaga Kontrak menurut pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM

**Tabel 1.5. Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Per November 2018**

Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai Kontrak
L	P	S2	S1	SM/D3	SMA / SMK	SLTP	SD	
14	7	0	10	1	11	0	0	22

Berikut disajikan Tabel Pendidikan Pegawai Kontrak menurut pendidikan dan jenis kelamin

**Tabel 1.6. Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per November 2018**

NO.	BAGIAN / BIDANG	P E N D I D I K A N												JUMLAH	
		SD		SLTP		SMA/SMK		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	0	0	0	0	8	2	0	1	3	4	0	0	11	7
2.	Bidang Industri	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Bidang Koperasi & UKM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
J U M L A H														12	8

#### **D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi**

Dalam penentuan isu strategis perlu dilakukannya identifikasi terhadap permasalahan yang ada di Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berikut permasalahan yang terdapat di bidang :

##### **a. Permasalahan bidang Perindustrian**

- Ketatnya tingkat persaingan pasar
- Tingginya cost Produksi
- Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk
- Produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha Kalimantan Utara tidak cukup baik untuk bersaing di pasaran nasional maupun internasional
- Masih rendahnya kopetensi pelaku IKM
- Belum terpromosikannya produk IKM dengan baik
- Perizinan (sertifikasi) yang terlalu panjang dan cukup lama dan berpengaruh pada produktifitas Pelaku IKM.

## **b. Permasalahan bidang Perdagangan**

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan antara lain adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri
- Minimnya pengetahuan pelaku usaha dalam peningkatan dan pengembangan produk-produknya dan mekanisme dalam melakukan kegiatan ekspor/impor
- Kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk masih tergolong rendah
- Jaringan distribusi yang sulit dikarenakan minimnya infrastruktur penunjang sehingga meningkatkan cost produk-produk yang digunakan di daerah Kaltara sendiri maupun produk yang ditawarkan ke pasar nasional maupun internasional
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen
- Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan
- Belum terpromosikannya produk pelaku usaha dengan baik

## **c. Permasalahan Bidang Koperasi dan UKM**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan urusan Koperasi dan UKM antara lain adalah sebagai berikut :

- Rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola koperasi
- Meningkatnya koperasi tidak aktif
- Masih rendahnya kompetensi pelaku UKM dan UKM
- Rendahnya tingkat kewirausahaan pengelola UKM
- Fasilitas untuk promosi produk UKM sangat terbatas
- Pemahaman yang masih kurang untuk (Manajerial) pengetahuan aliran keuangan usaha yang menunjang perhitungan laba dan rugi usaha UKM
- Lemahnya strategi untuk mencapai kesuksesan sebuah UKM/Koperasi
- Sulitnya pemasaran produk UKM

Selain permasalahan yang terdapat di bidang, terdapat juga permasalahan lain sebagai berikut :

- Kurang memadainya Sumber Daya Manusia pegawai dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Kurang memadainya sarana/prasarana penunjang

## **E. Sistematika Penulisan**

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara terdiri dari 4 (Empat) bab, yaitu:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pendahuluan mencakup : Gambaran Umum SKPD, Tugas dan Fungsi, Sumberdaya Organisasi, Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi dan Sistematika penyajian Laporan Kinerja.

### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Bab ini mencakup Perencanaan Kinerja mencakup : Strategi dan Kebijakan Perjanjian Kinerja.

### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini mencakup : Akuntabilitas kinerja, capaian-capaian di perjanjian Kinerja, analisis hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang ada di perjanjian kinerja, pengungkapan renstra baru yang belum dapat diukur di tahun 2016.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika Ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan apapun kegagalan pernyataan kinerja;

#### **Bab IV : Penutup**

Bab ini mencakup : Kesimpulan, hasil analisis berupa hambatan dari bab III sasaran, langkah-langkah yang dilakukan ditahun berikutnya untuk mengatasi hambatan, pengungkapan Renstra baru dengan menyusun perjanjian kinerja baru yang sesuai dengan renstra;

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Rencana Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

*Table 2.1.Strategi dan Kebijakan*

NO.	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Meningkatnya Daya Saing Industri	Peningkatan industri yang berdaya saing tinggi	1. Menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing 2. Menciptakan produk layak jual dan memenuhi standar 3. Menciptakan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal 4. Meningkatkan sarana penunjang industri
2	Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan dalam negeri	Meningkatnya perdagangan lokal yang optimal	Efisiensi perdagangan dalam negeri dan Peningkatan tertib perdagangan.	1. Mewujudkan perdagangan lokal yang optimal
			Peningkatan Pertumbuhan Pelaku Ekspor	1. Penyediaan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri 2. Membentuk Asosiasi Eksortir 3. Mengembangkan Kluster Produk Ekspor

NO.	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				4. Membangun Promosi Perdagangan Internasional 5. Membangun Hubungan Kerja sama dengan Negara lain 6. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	pembinaan dan pengawasan aktivitas perdagangan	2. Peningkatan pengawasan barang beredar
3	Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UKM berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM sehat	Pengembangan kelembagaan usaha Koperasi dan UKM yang berdaya saing tinggi.	1. Meningkatkan Kapasitas kompetensi pelaku Koperasi dan UKM 2. Melaksanakan Sosialisasi tentang perkoperasian dan UKM 3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan generasi muda melalui pelatihan kewirausahaan 4. Menyelenggarakan Promosi Produk UKM dan UKM 5. Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Merupakan Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dimana pihak pertama adalah Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak ke dua adalah Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Ir. Irianto Lambrie, M.M sebagai acuan kerja Dinas Perindagkop dan UKM pada tahun anggaran 2018 dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

**Table 2.2 Perjanian Kinerja dan target**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya daya saing industri	1. Nilai Produksi IKM  2. Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	843 M  2,4%
2.	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2%
		Persentase pertumbuhan pelaku ekspor	2%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	36%
3.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	1. Persentase UKM Produktif  2. Persentase Koperasi Sehat	23%  20%

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Akuntabilitas Kinerja

##### 1. Capaian – capaian di perjanjian kinerja

Capaian indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai produksi IKM
2. Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
3. Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
4. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor
5. Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi
6. Persentase UKM Produktif
7. Persentase Koperasi Sehat

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya daya saing industri	Nilai Produksi IKM	843 M	890M
		Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,4%	5,54%

2.	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2%	
		Persentase pertumbuhan pelaku ekspor	2%	6%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	36%	17%
3.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	23%	24%
		Persentase Koperasi Sehat	20%	14%

**B. Analisis Hambatan dan upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK**

Bagian ini akan menguraikan analisis hambatan dan upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK, dengan melakukan analisa terhadap permasalahan – permasalahan yang dapat menghambat pencapaian, kinerja yang telah diperjanjikan sebagaimana Perjanjian Kinerja 2018 antara Kepala Daerah dan Kepala OPD, dan hambatan serta upaya yang dilakukan terkait penapaian Perjanjian Kinerja terangkum dalam table berikut :

**Tabel 3.2**  
**Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK**

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Saing Industri	Masih terdapat IKM yang belum memenuhi standarisasi produk sehingga masih kalah bersaing dalam penjualannya	Dialukannya sosialisasi dan pelatihan tentang pengolahan produk menggunakan teknologi.
2	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum berorientasi ekspor	Dilakukan Sosialisasi kepada pelaku ekspor dan melakukan promosi terhadap produk lokal ke pasar internasional
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya melindungi hak – hak konsumen	Dilakukan Pengawasan Barang beredar dan Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk melindungi hak-hak konsumen.
3	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	1. Masih banyaknya pelaku ukm yang belum memahami mengenai manajemen keuangan sehingga mereka lebih rentan untuk mengalami kebangkrutan	1. Telah dilakukan pendampingan melalui kegiatan pendampingan koperasi dan UKM yang bersumber dari dana DAK Kementerian Koperasi dan UMKM
		2. Masih terdapat koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan RAT dan terdapat koperasi yang belum memenuhi aspek organisas, aspek usaha, aspek keuangan, aspek social dan aspek sumber daya manusia sehingga belum memenuhi kategori koperasi sehat	2. Telah dilakukan pembinaan koperasi dan dilakukan monitoring kepada koperasi untuk dievaluasi, dan sebagai menambah minat koperasi untuk meningkatkan status koperasi yang dijalankan dilakukan pemberian penghargaan koperasi berprestasi dalam upaya untuk memacu koperasi menjad lebih baik lagi.

### C. Pengungkapan Renstra Yang Belum Dapat Diukur Di Tahun 2018

Dalam Pengungkapan renstra baru yang belum dapat diukur di tahun 2018, tidak terdapat indikator program dan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak memiliki relevansi, antara indikator dan satuan yang terdapat dalam Program maupun Kegiatan yang terdapat dalam renstra 2018.

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan target dalam pelaksanaan kinerja tahun 2018 dan dapat dilihat pula perbandingan antara Target yang telah ditetapkan dan Realisasi Kinerja yang telah dicapai antara lain adalah;

**Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian Target
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya daya saing industri	Nilai Produksi IKM	843 M	890M
		Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,4%	5,54%
2.	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2%	-
		Persentase pertumbuhan pelaku ekspor	2%	6%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	36%	17%

3.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	23%	24%
		Persentase Koperasi Sehat	20%	14%

### 3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Dalam realisasi serta capaian kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 terdapat perbandingan dengan tahun sebelumnya, diantaranya adalah perbedaan dari target sasaran dan indikatornya sehingga menyebabkan perbedaan dalam realisasi kinerja dan capaian kinerja antara tahun 2016 dan 2018 hal ini dikarenakan telah dilakukan revisi terhadap Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM, Maka dari itu tidak dapat dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis dan indikator capaian.

**Tabel 3.5. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2017-2018**

NO	Sasaran Strategis 2017	Indikator Kinerja 2017	Capaian Kinerja	Sasaran Strategis 2018	Indikator Kinerja 2018	Capaian Kinerja
1	Terciptanya manajemen dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pelayanan	73%	-	-	-

2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Nilai Produksi IKM	800M	Meningkatnya daya saing industri	Nilai Produksi IKM	890M
		Prosentase Nilai Tambah Sektor Industri	15%		Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	5,54
3	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	6,87%	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	-
					Persentase pertumbuhan pelaku ekspor	6%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	39,22%	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	17%
4	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase Koperasi Sehat	31%	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	24%

		Persentase Koperasi Sehat	78%		Persentase Koperasi Sehat	14%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Pada bagian ini dilakukan perbandingan antara realialisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra antara lain seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Renstra**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian Target	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya daya saing industri	Nilai Produksi IKM	843 M	890M	1 T
		Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,4%	5,54%	3%
2.	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2%	-	2,5%
		Persentase pertumbuhan pelaku ekspor	2%	6%	2%

	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	36%	17%	25%
3.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	23%	24%	30%
		Persentase Koperasi Sehat	20%	14%	25%

#### **4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional**

Pada bagian ini tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan tidak terdapat standar nasional pada urusan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, maka ditemui beberapa Penyebab Keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan ditahun 2018 antara lain sebagai berikut :

Keberhasilan :

- a. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Koperasi dan UKM dapat melakukan kegiatan pendampingan kepada Koperasi guna meningkatkan kemampuan dari pada koperasi itu sendiri agar koperasi tersebut dapat menjadi koperasi yang dapat memberikan manfaat kepada anggota dan lingkungan dimana koperasi tersebut didirikan, selain itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui bidang koperasi memberikan pelatihan dalam

kemampuan membuat serta pelatihan keterampilan salon untuk membantu pelaku UKM lebih berdaya saing, untuk mendukung tercapainya peningkatan koperasi yang sehat dan UKM yang produktif namun memiliki kualitas dalam pengolahan produknya.

- b. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Industri melakukan pelatihan Kepada Pelaku IKM untuk menambah kemampuan kepada pelaku IKM, agar dapat menghasilkan produk yang lebih baik lagi, dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut maka akan dapat membantu pelaku IKM dalam menambah nilai produksi dan dengan meningkatnya produksi IKM akan menambah nilai tambah industri itu sendiri.
- c. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Perdagangan dalam negeri dapat melaksanakan Kegiatan pengawasan Subsidi Ongkos Angkut kedaerah perbatasan Kalimantan utara, Pasar Murah, dan pengawasan peredaran barang, pengawasan Sistem ongkos angkut tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran pengiriman barang pokok kebutuhan warga Kalimantan utara yang ada diperbatasan dan kegiatan pembangunan pasar rakyat di kecamatan tanjung palas hilir untuk menumbuhkan perekonomian didaerah tersebut dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menunjang peningkatan PDRB sektor perdagangan di Kalimantan Utara.
- d. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Perdagangan Luar Negeri melakukan Promosi Produk Lokal Kalimantan Utara Kepada Pasar Internasional dengan dikenalnya produk-produk pelaku usaha di Kalimantan utara akan meningkatkan nilai jual produk Kalimantan utara di pasar internasional, yang mana akan menambah pendapatan dari pelaku itu sendiri serta secara tidak langsung meningkatkan nilai ekspor non migas di Kalimantan utara, dan dapat mendukung peningkatan PDRB sektor perdagangan.

Kegagalan :

- a. Masih didapatinya pelaku IKM yang belum dapat memaksimalkan pengolahan Produk industri dari hulu hingga ke hilir dimana pengembang dari inovasi akan produk yang dihasilkan Dinas Perindagkop dan UKM terkendala dengan alokasi dana yang terbatas dimana seharusnya dapat dilakukan pelatihan tentang inovasi teknologi terhadap pelaku IKM, dengan demikian kurang mendukung peningkatan nilai tambah sektor industri.
- b. Masih terdapat Koperasi yang belum dapat melakukan manajerial koperasi dengan baik sehingga membuat koperasi tersebut tidak aktif atau bahkan dapat dibubarkan.

Solusi :

- a. Dinas Perindagkop dan UKM telah merencanakan dalam tahun anggaran 2019 akan membuat kegiatan pelatihan pengembangan sistem inovasi teknologi industri dalam membuat sebuah produk, yang dimana nanti dapat meningkatkan kualitas produk IKM dan dapat menambah nilai tambah industri di Kalimantan utara.
- b. Dinas Perindagkop dan UKM telah merencanakan dalam tahun anggaran 2019 akan meningkatkan pembinaan, pengawasan kepada koperasi di Provinsi Kalimantan Utara.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sampai dengan akhir Desember tahun 2018 Dinas Perindagkop dan UKM memiliki jumlah Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung oleh 3 Orang dengan Pendidikan S2, 47 Orang S1, 5 Orang D3, 4 Orang SLTA dan didukung oleh 10 Orang S1, 1 Orang D3, 11 Orang SMA Tenaga Kontrak.

Dalam efisiensi penggunaan sumberdaya manusia yang ada dinas perindagkop menempatkan pegawai dengan beban kerja yang cukup

merata walaupun masih didapati beberapa jabatan yang belum sesuai dengan jabatannya.

Pada Tahun anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Menerima Pagu anggaran sebesar Rp. 25.136.031.301,-, dan setelah dilakukan Perubahan Anggaran pada bulan Oktober 2018 Pagu anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi Rp. 26.016.031.301,-

**Belanja Langsung :**

**a. Sekretariat**

Alokasi anggaran Rp. 4.958.510.462,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.170.996.317,- atau sebesar 84.12% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp 787.514.145,-

**b. Perindustrian**

Alokasi anggaran Rp. 2,999.566.840- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.939.225.928,- atau sebesar 97,99% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 60.340.912,-

**c. Perdagangan Dalam Negeri**

Alokasi anggaran Rp. 14.398.396.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.217.856.066,- Atau Sebesar 98.75% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 180.539.934,-

**d. Perdagangan Luar Negeri**

Alokasi anggaran Rp. 691.636.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 671.022.030 ,- atau sebesar 97.02 % dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 20.613.970,-

**e. Koperasi dan UKM**

Alokasi anggaran Rp. 2.967.922.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2,726.662.042,- atau sebesar 91.87 % dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 238.456.707,- .

## 7. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada tahun 2018, Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas perindagkop bertujuan untuk menunjang dari pada pencapaian perjanjian kinerja Kepala OPD seperti pada sajian tabel berikut;

**Tabel 3.7 Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (2018)		Sasaran Strategis PK 2018	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian Target	Keterangan
1	<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>411.800.000</b>	<b>408.397.319</b>	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	36%	17,00%	Realisasi Program dan Kegiatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan 3 kegiatannya mendukung upaya pencapaian dalam menekan peredaran barang yang tidak layak konsumsi, Secara umum Pengawasan peredaran barang dan jasa dilakukan selama 3 bulan sekali di 5 kabupaten dan Kota Wilayah Kalimantan Utara. Objek Pengawasan terdiri atas produk-produk penjualan pada Toko-toko distributor.
	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	125.400.000	123.785.573					
	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	154.400.000	154.019.800					
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa	132.000.000	130.591.946					
2	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil menengah</b>	<b>2.843.938.000</b>	<b>2.605.481.293</b>	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM sehat	Persentase UKM Produktif	23%	24,00%	Pelaksanaan Program Pengembangan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang mendukung untuk meningkatkan UKM yang produksi dan dengan adanya kegiatan pendampingan kepada koperasi melalui kegiatan pendampingan koperasi akan dapat menunjang pertumbuhan koperasi sehat dimana tugas dari pendampingan
	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	90.800.000	49.247.500					
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	2.500.000.000	2.312.630.210					
	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM*	253.138.000	243.603.583					

								koperasi adalah memberikan bimbingan terhadap koperasi dan melaksanakan pelaporan dan manajemen keuangan koperasi
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	123.984.000	121.180.749					Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan didukung dengan kegiatan Monev dan Pelaporan dimaksudkan untuk dapat memberikan pengawasan dan evaluasi kepada koperasi- koperasi yang belum menuntaskan kewajibannya dalam berkoperasi, seperti sudah memenuhi aspek organisasi yang baik, aspek usaha yang baik, aspek keuangan yang baik, aspek sosial yang baik dan aspek SMD yang baik untuk dapat dikategorikan sebagai koperasi yang sehat
	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	42.550.000	41.518.000					
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	81.434.000	79.662.749		Persentase Koperasi Sehat	20%	14,00%	
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	208.235.000	197.536.621					Pada pelaksanaan Program dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan didukung oleh kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri memberikan pelatihan kepada Pelaku IKM untuk menambah kemampuan kepada pelaku IKM, agar dapat menghasilkan produk yang lebih baik lagi, dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut maka akan dapat membantu pelaku IKM dalam menambah nilai produksi dan dengan meningkatnya produksi IKM akan menambah nilai tambah industri.
	Pembinaan kemampuan teknologi industri	208.235.000	197.536.621	Meningkatnya Daya Saing Industri	Nilai Produksi IKM	843 M	890 M	
5	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.791.331.840	2.741.689.307					Dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan inovasi dan

	Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Industri kecil dan Menengah	787.421.840	776.358.307		Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,40%	5,54%	kompetensi bagi pelaku IKM dalam mengembangkan dan mengelola usaha terhadap output usaha/produk yang dihasilkan oleh masing-masing IKM di masing-masing instansi di Kabupaten / Kota se Kaltara.
	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri*	2.003.910.000	1.965.331.000					
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>691.636.000</b>	<b>671.022.030</b>					
	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	66.136.000	65.819.635					
	Membangun jejaring dengan eksportir	67.450.000	65.314.041					
	Pembangunan promosi perdagangan Internasional	292.000.000	289.094.497					
	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan internasional*	199.000.000	185.198.907					
	Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional*	67.050.000	65.594.950	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Ekspor	2%	0,00%	Melalui Program peningkatan dan pengembangan ekspor dan kegiatan pemabangan promosi perdagangan internasional dapat dilaksanakan, Promosi Produk Lokal Kalimantan Utara Kepada Pasar Internasional dengan dikenalnya produk-produk pelaku usaha dikalimantan utara akan meningkatkan nilai jual produk Kalimantan utara di pasar internasional, yang mana akan menambah pendapatan dari pelaku itu sendiri serta secara tidak langsung meningkatkan nilai ekspor non migas di Kalimantan utara, dan dapat mendukung peningkatan PDRB sektor perdagangan.
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	<b>13.986.596.000</b>	<b>13.809.458.747</b>					
	Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk	130.000.000	127.957.500					
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	158.796.000	157.771.000					
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	28.800.000	28.752.900					
	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	141.500.000	137.279.347					
	Pembangunan Pasar Rakyat*	13.500.000.000	13.331.202.000					
	Kegiatan Pasar Murah*	27.500.000	26.496.000	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2%	0,00%	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan didukung 2 kegiatan pelaksanaan, dapat terselenggaranya pengawasan Produk beredar dikalimantan utara, pengawasan Sistem Ongkos Angkut (SOA) keterbatasan dan Kegiatan pasar murah untuk mendukung ketersediaan barang pada hari raya besar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2018 dapat dikategorikan cukup berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala
-

permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks. Namun sebagian Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Disperindagkop & UKM Provinsi maupun Kab/Kota dalam salah satu upaya mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan laporan Lakip ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Pemerintahan yang akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat terukur dan tepat sasaran dalam sebuah pelaksanaan Program dan Kegiatan.

#### **B. Hasil Analisis Berupa Hambatan dari Bab III Sasaran**

Hasil analisis hambatan yang disajikan pada Bab III akan disajikan kembali dalam tabel berikut :

***Tabel 4.1 Analisis Hambatan***

No	Hambatan	Upaya yang dilakukan
4	2	3
1	Masih terdapat produk IKM yang belum memenuhi standarisasi produk sehingga masih kalah bersaing dalam penjualanya	Dialkukannya sosialisasi dan pelatihan tentang pengolahan produk menggunakan teknologi.
2	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum berorientasi ekspor dan masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya melindungi hak – hak konsumen	Dilakukan Sosialisasi kepada pelaku eskpor dan melakukan promosi terhadap produk lokal ke pasar internasional. Membentuk BPSK dan Melakukan pengawasan produk barang dan jasa beredar di Porvinsi Kalimantan Utara.
3	Masih banyaknya pelaku ukm yang belum memahami mengenai manajemen keuangan sehingga mereka lebih rentan untuk mengalami kebangkrutan	Telah dilakukan pendampingan melalui kegiatan pendampingan koperasi dan UKM yang bersumber dari dana DAK Kementerian Koperasi dan UMKM

**C. Langkah-langkah Yang Akan Dilakukan Di Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Hambatan**

Untuk Mengatasi Hambatan yang terjadi maka akan dilakukan langkah-langkah berupa :

***Tabel 4.2 Hambatan dan Upaya dilakukan tahun berikutnya***

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan ditahun berikutnya
1	2	3	4
2	Meningkatnya Daya Saing Industri	Masih terdapat IKM yang belum memenuhi standarisasi produk sehingga masih kalah bersaing dalam penjualannya	Akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pengolahan produk menggunakan teknologi.
3	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Keterbatasan fasilitas penunjang perdagangan dalam negeri, Masih banyaknya pelaku usaha yang belum berorientasi ekspor dan masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya melindungi hak – hak konsumen	Pada tahun berikutnya akan diupayakan melakukan penyediaan fasilitas perdagangan seperti pembangunan pasar, layanan informasi perdagangan online, kemudian Akan dilakukan Sosialisasi kepada pelaku ekspor dan melakukan promosi terhadap produk lokal ke pasar internasional serta melakukan pengawasan terhadap produk barang dan jasa yang beredar dan untuk melindungi hak-hak konsumen di Provinsi Kalimantan Utara.
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar		
4	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Masih banyaknya pelaku ukm yang belum memahami mengenai manajemen keuangan sehingga mereka lebih rentan untuk mengalami kebangkrutan, dan dalam perkembangan koperasi di wilayah Kalimantan	Akan dilakukan dan diteruskan melakukan pendampingan melalui kegiatan pendampingan koperasi dan UKM yang bersumber dari dana DAK Kementerian Koperasi dan UMKM

		utara masih didapati koperasi yang tidak aktif maupun koperasi yang aktif namun tidak melaksanakan kewajibanya dalam mengelola koperasi seperti RAT.	
--	--	--	--

#### **D. Pengungkapan Renstra Baru Dengan Menyusun Perjanjian Kinerja Baru Yang Sesuai Dengan Renstra**

Dengan dilakukannya beberapa kali revisi yang diakomodir oleh bappeda maka Renstra Dinas Perindagkop dan UKM telah disesuaikan dan dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan renstra, dengan berpedoman dengan Permendagri 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengndalian dan Evaluasi, dengan itu pula dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 yang telah disesuaikan dengan renstra terbaru Dinas Perindagkop dan UKM dengan indikator dan target sasaran yang lebih relevan dan dapat diukur;

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS PK 2018	INDIKATOR KINERJA PK 2018	TARGET PK 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kontribusi sektor industri	Meningkatnya Daya Saing Industri	1. Nilai produksi IKM	Meningkatnya Daya Saing Industri	1. Nilai produksi IKM	843 Milyard
			2. Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		2. Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,4%
2	Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	2%

			2. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor		2. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor	2%
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	36%
3	Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UKM berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan usaha kecil sehat	Persentase UKM Produktif		Persentase UKM Produktif	23%
			Persentase Koperasi Produktif		Persentase Koperasi Produktif	20%

Kepala Dinas,



Drs. Hartono, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196105071985031014

## **Ringkasan Eksekutif**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Utara

Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung oleh 3 Orang dengan Pendidikan S2, 47 Orang S1, 5 Orang D3, 4 Orang SLTA dan didukung oleh 10 Orang S1, 1 Orang D3, 11 Orang SMA Tenaga Kontrak.

### **A. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi**

Dalam penentuan isu strategis perlu dilakukannya identifikasi terhadap permasalahan yang ada di Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berikut permasalahan yang terdapat di bidang :

#### **a. Permasalahan bidang Perindustrian**

- Ketatnya tingkat persaingan pasar
- Tingginya cost Produksi
- Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk
- Produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha Kalimantan Utara tidak cukup baik untuk bersaing di pasaran nasional maupun internasional
- Masih rendahnya kompetensi pelaku IKM
- Belum terpromosikannya produk IKM dengan baik
- Perizinan (sertifikasi) yang terlalu panjang dan cukup lama dan berpengaruh pada produktifitas Pelaku IKM.

## **b. Permasalahan bidang Perdagangan**

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan antara lain adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri
- Minimnya pengetahuan pelaku usaha dalam peningkatan dan pengembangan produk-produknya dan mekanisme dalam melakukan kegiatan ekspor/impor
- Kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk masih tergolong rendah
- Jaringan distribusi yang sulit dikarenakan minimnya infrastruktur penunjang sehingga meningkatkan cost produk-produk yang digunakan di daerah Kaltara sendiri maupun produk yang ditawarkan ke pasar nasional maupun internasional
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen
- Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan
- Belum terpromosikannya produk pelaku usaha dengan baik

## **c. Permasalahan Bidang Koperasi dan UKM**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan urusan Koperasi dan UKM antara lain adalah sebagai berikut :

- Rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola koperasi
- Meningkatnya koperasi tidak aktif
- Masih rendahnya kompetensi pelaku UKM dan UKM
- Rendahnya tingkat kewirausahaan pengelola UKM
- Fasilitas untuk promosi produk UKM sangat terbatas
- Pemahaman yang masih kurang untuk (Manajerial) pengetahuan aliran keuangan usaha yang menunjang perhitungan laba dan rugi usaha UKM
- Lemahnya strategi untuk mencapai kesuksesan sebuah UKM/Koperasi
- Sulitnya pemasaran produk UKM

Selain permasalahan yang terdapat di bidang, terdapat juga permasalahan lain sebagai berikut :

- Kurang memadainya Sumber Daya Manusia pegawai dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Kurang memadainya sarana/prasarana penunjang

- Perjanjian Kinerja Merupakan Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dimana pihak pertama adalah Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak ke dua adalah Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Ir. Irianto Lambrie, M.M sebagai acuan kerja Dinas Perindagkop dan UKM pada tahun anggaran 2018 dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

**Table Perjanian Kinerja dan target**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya daya saing industri	1. Nilai Produksi IKM  2. Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	843 M  2,4%
2.	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2%
		Persentase pertumbuhan pelaku ekspor	2%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	36%
3.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	1. Persentase UKM Produktif  2. Persentase Koperasi Sehat	23%  20%

## B. Akuntabilitas Kinerja

### 1. Capaian – capaian di perjanjian kinerja

Capaian indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai produksi IKM
2. Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
3. Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
4. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor
5. Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi
6. Persentase UKM Produktif
7. Persentase Koperasi Sehat

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya daya saing industri	Nilai Produksi IKM	843 M	890M
		Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,4%	5,54%
2.	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2%	
		Persentase pertumbuhan pelaku ekspor	2%	

	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	36%	17%
3.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	23%	24%
		Persentase Koperasi Sehat	20%	14%

### C. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2018 dapat dikategorikan cukup berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks. Namun sebagian Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Disperindagkop & UKM Provinsi maupun Kab/Kota dalam salah satu upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Utara.